

MEMBANGUN MASYARAKAT GLOBAL DARI SEKOLAH

Oleh: Udik Budi Wibowo¹

Abstrak

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan lokal, regional maupun internasional. Sejalan dengan perkembangan itu, sekolah tidak dapat menafikan proses globalisasi kehidupan dunia. Globalisasi ini berimplikasi pada tuntutan reformasi pendidikan yang menyangkut segi kurikuler dan segi manajemen pendidikan.

Dari segi kurikuler, substansi pendidikan harus dapat menyadarkan peserta didik akan kehidupan dunia yang majemuk, yang saling berinterelasi dan berinteraksi; yang berdampak pada kebutuhan untuk saling kerjasama antar bangsa, dan sekaligus dapat pula berakibat pada tumbuhnya persaingan dan konflik. Adapun dari segi manajemen pendidikan diperlukan kebijakan yang memungkinkan sekolah dan guru dapat menjalankan kewenangan pedagogisnya secara profesional sesuai dengan tuntutan akuntabilitas dari para pihak yang berkepentingan terhadap sekolah. Dalam hal ini guru harus mempunyai komitmen dan kemampuan meterjemahkan kurikulum berwawasan global ke dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif, demokratis, dalam suasana bebas yang bertanggung jawab. Untuk itu kewenangan birokrasi administratif harus didayagunakan guna mendukung pelaksanaan kewenangan pedagogis, sehingga kegiatan pembelajaran untuk menyiapkan peserta didik memasuki masyarakat global dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif.

Kata kunci: masyarakat global, sekolah

Pendahuluan

Globalisasi telah menjadi fenomena kehidupan di Millenium Ketiga atau Abad 21 yang tidak dapat dielakkan oleh penduduk di berbagai kawasan belahan dunia mana pun, termasuk Indonesia. Dalam menghadapi kenyataan globalisasi ini, menurut Mochtar Buchori (2001: 47) kita menghadapi dua pilihan, yakni: membiarkan diri terseret oleh proses globalisasi; atau kita memanfaatkan proses globalisasi untuk pembangunan bangsa dan negara. Keduanya merupakan pilihan yang berat. Pilihan pertama menjadikan kita hanya sebagai penonton, atau bahkan sebagai pecundang (*the looser*) yang menjadi beban sejarah; atau jika memilih yang kedua berarti kita harus berjuang keras untuk menjadi partisipan aktif, bahkan kalau perlu menjadi pemenang (*the winner*).

Dengan mempertimbangkan kebermanfaatannya bagi kelangsungan hidup individu, bangsa dan negara; tampaknya pilihan kedua menjadi sesuatu yang harus

diwujudkan. Untuk itu agar dapat berperan aktif dalam percaturan global yang sarat kompetisi sekaligus kerjasama tersebut maka diperlukan individu-individu yang memiliki keunggulan komparatif tidak hanya dalam skala lokal dan regional saja, tetapi juga dalam skala internasional. Sumberdaya manusia (SDM) yang unggul semacam ini hanya dapat dikembangkan melalui pendidikan yang bermutu, sehingga "bidang pendidikan menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia" (Suyanto 2000: 3). Dengan kata lain, "bila bangsa ini melalaikan pendidikan, berarti ia juga menelantarkan masa depannya sendiri" (Buchori, 2001: 7). Berdasarkan pemikiran tersebut maka "kita tidak dapat mendiskusikan milenium ketiga atau abad 21 tanpa membicarakan pendidikan di dalamnya" (Tony Blair dalam Eko Budihardjo, 2002).

Kualitas SDM negara kita, menurut laporan Bank Dunia yang dilansir oleh berbagai media dan dikutip oleh banyak penulis, berada pada posisi yang memprihatinkan. Dari 106 negara, angka indeks kualitas SDM kita berada pada peringkat 102, sebuah posisi yang cukup jauh dibandingkan dengan negara tetangga sesama ASEAN (misal Singapura pada peringkat 34, Brunai 36, Thailand 52, dan Malaysia 53). Data lain menunjukkan bahwa lebih dari separuh angkatan kerja (53%) di Indonesia tidak berpendidikan, 34% berpendidikan dasar, 11% berpendidikan menengah dan hanya 2% berpendidikan universitas (Budiono, 1997: 81). Data tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan di negara kita belum menggembirakan, yang berarti pula kita belum siap benar untuk menghadapi persaingan pada milenium ketiga.

Dalam konteks kesiapan ini, kita perlu bercermin pada ungkapan Arcaro (1995: 3) bahwa "*Many of today's education professionals lack the knowledge or expertise necessary to prepare students for entry into a global labor market*". Jika demikian lantas bagaimanakah memfungsikan sektor pendidikan sebagai ujung tombak untuk mempersiapkan SDM dan sumberdaya bangsa agar memiliki keunggulan kompetitif dalam berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin global?

Sekolah sebagai Wahana Pengembangan Kecakapan Hidup

Pendidikan dapat dipandang sebagai proses perolehan pengalaman belajar yang bermakna untuk mengembangkan potensi seseorang (cipta, rasa, dan karsa) ke

¹ Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY Yogyakarta

arah yang secara normatif lebih baik, yang diperlukan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan dan jaman tertentu. Sebagaimana kita pahami bahwa dalam era globalisasi yang kompetitif dan sekaligus kolaboratif sekarang ini diperlukan individu-individu yang memiliki keunggulan (*excellence*) komparatif agar untuk dapat berperan aktif atau menjadi pemenang. Untuk itu kriteria keunggulan tersebut harus menjadi acuan dari setiap penyelenggaraan pendidikan masa kini.

Dalam kaitan itu D. Bob Gowin (1990: 35) menyatakan bahwa pendidikan berkenaan dengan penajaman "*human dispositions*" (seperti keyakinan, perilaku, dan tindakan) melalui penggunaan berbagai bahan yang bermakna yang dipilih sesuai kriteria keunggulan. Berbagai keyakinan dan perilaku manusia tersebut dapat dipertajam melalui beragam cara, seperti indoktrinasi, *conditioning* (semacam pelatihan, pen.) dan sosialisasi. Sementara itu Zamroni (2000: 81) menyatakan bahwa pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni: pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup.. Dengan demikian pendidikan merupakan berbagai cara atau upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap dan perilaku seseorang agar dapat hidup secara bermakna dalam lingkungan masyarakat dan jamannya.

Sebagaimana diungkapkan di atas, tersedia beragam cara atau upaya untuk mengembangkan potensi manusia; atau seperti diungkapkan Zamroni (2000: 81) bahwa upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Meskipun demikian sebagian besar orang mengandalkan kepada pendidikan formal di sekolah, karena jenis pendidikan ini tidak hanya merupakan intervensi yang disengaja di dalam kehidupan seseorang, tetapi juga suatu intervensi dengan seperangkat bahan didikan yang diseleksi dan disaring berdasarkan kriteria kebermaknaan dan keunggulan yang diakui oleh masyarakat sekitarnya, yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Demikianlah maka sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal menduduki peran yang strategis di dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki era globalisasi.

Menurut Handy dan Aitken (1986: 38-39), setidaknya ada tiga fungsi pokok sekolah, yakni:

- (a) *Custodial*, yakni memelihara anak-anak, jika mereka muda agar orangtua mereka dapat bekerja, jika usinya lebih dewasa agar mereka tidak berada dijalanan dan meminta-minta.
- (b) *Certificating*, untuk menjamin sebanyak mungkin anak-anak dapat meninggalkan sekolah dengan sertifikat yang menunjukkan kemampuan dan atau keterampilan yang dikuasai.
- (c) *Socializing*, mendorong anak-anak untuk dapat memenuhi standar-standar moralitas dan perilaku, nilai-nilai dan kepercayaan (melalui *hidden curriculum*) yang dianut oleh masyarakatnya.

Dengan demikian pendidikan formal di sekolah dapat dipandang sebagai cara yang sistematis untuk memelihara peserta didik dan mengembangkan berbagai potensi (cipta, rasa dan karsa) yang dimilikinya sebagai bekal untuk mengarungi kehidupannya, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan akhirat.

Setiap orang, dimanapun dan apapun peran atau kedudukannya, di dalam mengarungi kehidupannya pasti dihadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dipecahkan agar tidak membebani perjalanan hidupnya. Untuk itu diperlukan keberanian untuk menghadapi permasalahan kehidupan itu, dan selanjutnya diperlukan juga kemampuan untuk memecahkan permasalahan tersebut. "Kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya" seperti itu disebut sebagai "kecakapan hidup" atau "*life skill*" (Depdiknas, 2002: 6). Lebih lanjut dijelaskan bahwa kecakapan hidup ini dapat dipilah menjadi lima, yaitu:

- a. Kecakapan mengenal diri (*self awareness*), yang juga sering disebut kemampuan personal (*personal skill*).
- b. Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*).
- c. Kecakapan sosial (*social skill*).
- d. Kecakapan akademik (*academic skill*), dan
- e. Kecakapan vokasional (*vocational skill*).

Tiga yang pertama merupakan kecakapan yang bersifat umum, yang seringkali dikelompokkan sebagai *General Life Skill* (GLS), dan dua yang terakhir merupakan kecakapan yang bersifat khusus atau spesifik, yang dikelompokkan ke dalam *Specific Life Skill* (SLS).

Menurut Mochtar Buchori (2001: 50) pendidikan yang baik ialah pendidikan yang mempersiapkan para murid untuk menghadapi kehidupan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya mempersiapkan para siswa untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan, apapun masalah itu. Berdasarkan pemikiran ini maka menjadi suatu keharusan bagi sekolah untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup tadi. Dalam hal ini, para siswa harus dipersiapkan untuk menghadapi tiga tugas kehidupan, yakni:

- (1) untuk dapat hidup (*to make a living*).
- (2) untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*).
- (3) untuk turut memuliakan kehidupan (*to ennoble life*).

Di sekolah, alat (*tools*) untuk membentuk kecakapan hidup adalah matapelajaran/matakuliah/mata diklat (Depdiknas, 2002: 9). Sebagai alat, maka kompetensi yang dicapai dengan mempelajari matapelajaran/matakuliah/mata diklat tersebut hanyalah kompetensi antara untuk mewujudkan kemampuan hidup (*life skill* atau *life competency*) guna menghadapi berbagai problema nyata dalam kehidupan.

Perlu diingat bahwa pihak yang sesungguhnya paling menentukan keberhasilan pendidikan kecakapan hidup adalah para guru yang langsung terjun sebagai garda terdepan dalam proses pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu matapelajaran/matakuliah/matadiklat yang dikemas dalam bentuk kurikulum harus dimaknai dan dijabarkan ke dalam teknis pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan dasar peserta didik dan berbagai fasilitas pendukungnya sehingga setiap peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang bermakna untuk mengarungi hidup dan kehidupannya..

Dengan demikian dalam implementasi kebijakan pendidikan kecakapan hidup di sekolah, persoalan kurikulum sesungguhnya tidak begitu penting. Persoalan yang penting justru kemampuan guru menterjemahkan berbagai konsep kecakapan hidup tadi ke dalam proses pembelajaran yang bersifat teknis edukatif. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat kondisi lapangan sebagaimana direpresentasikan oleh tulisan E. Rukmini, seorang guru SMU swasta di Jakarta (Kompas, 2003: 5), "Begitu pentingkah kurikulum dibicarakan, bahkan dijadikan jaminan nilai jual tinggi? Sebab akhirnya, yang sampai ditelinga konsumen pendidikan adalah teknis pelaksanaan, bukan masalah kurikulum. Maka, sungguh

amat layak bila yang dijual ke sekolah adalah teknis proses belajar-mengajar; bukan kurikulum dari mana saja".

Konsepsi dan Implementasi Kebijakan yang Tidak Searah

Pada dasarnya pengembangan SDM Indonesia yang unggul untuk dapat berperan aktif dalam percaturan era global masih merupakan wacana semata. Tak ada konsistensi dan komitmen nyata dari berbagai pihak terhadap tugas besar tersebut, baik pada tataran politik-birokratik maupun teknis operasional di sekolah-sekolah.

Sejak tahun 1980-an, enam tahun setelah kita memulai Pelita, pengembangan mutu SDM diyakini sebagai kata kunci kemajuan. Namun apa yang terjadi? Setelah pada tahun anggaran 1982/1983, pertama kali sektor pendidikan memperoleh anggaran tertinggi, dari tahun ke tahun kemudian turun terus sampai keyakinan tersebut hanya menjadi busa pemanis para politisi dan pejabat yang berebut posisi. Sepanjang sejarah, alokasi anggaran pendidikan negara kita tidak lebih dari 10% terhadap anggaran nasional, jauh di bawah negara tetangga sesama anggota ASEAN, seperti Thailand dan Malaysia yang sudah mengalokasikan sekitar 20% (Kompas, 26 Februari 2000). Bahkan meskipun dalam revisi UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 telah memberikan imperatif kepada negara (pemerintah) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD, toh hal itu tidak dapat dilaksanakan.

Kita memahami bahwa alokasi anggaran bukan satu-satunya ukuran, tetapi besaran anggaran adalah terjemahan konkrit terhadap prioritas yang diberikan. Memang dengan adanya krisis ekonomi, ketersediaan anggaran negara menjadi sangat terbatas. Tetapi krisis ekonomi bukan alasan yang tepat untuk mengurangi budget pendidikan, sebaliknya justru pada saat ekonomi belum berkembang subsidi pendidikan itu sangat diperlukan. Menurut Darmaningtyas (1999: 155-157), kebijakan mengurangi subsidi pada krisis merupakan kekeliruan besar, karena kebijakan itu justru semakin mempersempit peluang kaum miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Sementara kebijakan penganggaran tidak mendapat perhatian yang semestinya dari pemerintah maupun legislatif, praksis pendidikan di sekolah selama ini telah diabdikan untuk melanggengkan ideologi politik penguasa yang tidak memberikan ruang gerak kepada individu (Darmaningtyas, 1999: 125-150; Buchori, 2001: 8). Berbagai penyeragaman --seperti pakaian dan kurikulum yang

diikuti penyeragaman metode mengajar dan sistem evaluasi pelajaran-- adalah bagian dari rekayasa penguasa untuk melakukan kontrol terhadap masyarakat. Dengan demikian pendidikan tidak lagi dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, mendewasakan pribadi manusia, dan memerdekakan siswa; melainkan dijadikan alat untuk mempertahankan *status quo*, yang menguntungkan kekuasaan dan kepentingan penguasa. Dalam kaitan ini Zamroni (2000: 38) menulis, "Dominasi birokrasi dan kontrol politik yang berlebihan dari pusat atas sekolah dan proses belajar mengajar melahirkan organisasi dan kultur sekolah yang tidak mendukung proses pendidikan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Organisasi sekolah yang bersifat birokratis sentralistis cenderung menimbulkan rigiditas dalam proses pendidikan, karena pendidikan diperlakukan secara klasikal dan mekanistik sebagai industri yang bisa dilaksanakan dengan instruksi dari pusat".

Birokrasi dan sentralisasi dalam pendidikan telah menimbulkan kultur birokratis di sekolah. Kepala sekolah lebih setia berkorban bagai pejabat atasannya daripada memperjuangkan nasib para guru. Demikian pula guru lebih patuh mengikuti pendapat kepala sekolah daripada memperjuangkan peserta didiknya. Organisasi sekolah yang bersifat birokratis sentralistis dan kultur sekolah otoriter birokratis telah gagal melaksanakan transmisi pengetahuan, sikap dan pola pikir peserta didik untuk mengantisipasi baik dalam dunia kerja maupun dalam dunia perguruan tinggi.

Untuk itu sekolah harus selalu mengembangkan kultur yang dapat mendukung proses belajar mengajar menjadi lebih baik. Sayangnya pembaharuan pendidikan yang telah dilaksanakan selama ini terlalu menekankan pada aspek teknis, fungsional dan individualistik tanpa menyentuh sedikitpun aspek kultur sekolah ini. Model ini dipengaruhi oleh ide bahwa sekolah sebagai suatu perusahaan atau industri yang melayani kebutuhan individu. Oleh karena itu pendidikan semacam itu akan bersifat *fragmented* yang satu dengan yang lain terpisah tidak ada kesatuan, dan melihat sekolah sebagai sesuatu yang berdiri sendiri bukan merupakan bagian dari masyarakat sekitar. Akibatnya hubungan dan interaksi antara sekolah dan masyarakat sekitar tidak pernah terjadi. Hal ini berarti sekolah telah menelantarkan sumber belajar yang sangat bermanfaat dan bermakna bagi proses belajar mengajar.

Memperhatikan hal di atas, menurut Zamroni (2000: 43), salah satu aspek dalam sekolah yang perlu direformasi adalah hubungan sosial di antara warga sekolah, termasuk orangtua murid dan masyarakat sekitar. Partisipasi orangtua dan

masyarakat dalam kehidupan sekolah akan merupakan modal pokok dalam proses pendidikan. Sekolah harus menjadikan dirinya bagian dari kemasyarakatan. Setiap kegiatan sekolah merupakan kegiatan masyarakat sekitar, sebaliknya setiap kegiatan masyarakat merupakan kegiatan sekolah.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa desentralisasi pendidikan menjadi pilihan kebijakan dalam pengelolaan pendidikan di masa depan. Namun demikian perlu dipahami bahwa *"success in education is elusive, hard to measure and, maybe, not evident until many years have passed"* (Handy dan Aitken, 1986: 38). Untuk itu kebijakan ini perlu dicermati implementasinya, karena ditengarai banyak daerah yang belum secara konsisten memprioritaskan bidang pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Hal ini bisa dimaklumi karena ukuran keberhasilan daerah lebih nyata terlihat pada ukuran-ukuran yang bersifat fisik (seperti gedung, jalan atau jembatan) atau finansial kuantitatif (seperti peningkatan pendapatan asli daerah). Tolok ukur keberhasilan seperti itu menjadi dasar penilaian kinerja sebagian besar para penyelenggara daerah agar dapat mempertahankan jabatan atau kekuasaan, dalam bentuk penerimaan laporan pertanggungjawaban. Dengan begitu tanpa penekanan pengawasan dari para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pendidikan terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD, prioritas peningkatan pendidikan akan tetap menjadi sekedar wacana semata.

Manajemen Persekolahan yang Memandirikan Peserta Didik

Pendidikan dapat dipandang sebagai beragam cara atau upaya yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap dan perilaku seseorang agar dapat hidup secara bermakna dalam lingkungan masyarakat dan jamannya. Implikasinya, pendidikan harus selalu dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan jaman. Perlu disadari bahwa apabila kita mendidik suatu generasi saat ini, sesungguhnya adalah mempersiapkan mereka untuk memasuki kehidupan di masa mendatang. Untuk itu "pendidikan yang baik selalu bersikap antisipatoris, yaitu mempersiapkan generasi muda untuk jenis kehidupan di masa datang, bukan untuk kehidupan masa kini" (Buchori, 2001: 45).

Menurut (Darmaningtyas, 1999: 152), menggagas pendidikan masa depan paling tidak mengandung dua hal penting. Pertama menyangkut soal substansi-filosofis pendidikan, yaitu tujuan dilaksakannya pendidikan; dan kedua menyangkut dimensi politis, yakni bagaimana posisi pendidikan dalam konstelasi

politik nasional. Dengan ungkapan lain "implikasi pendidikan berwawasan global menurut perspektif reformasi tidak hanya bersifat perombakan kurikulum, melainkan juga merombak sistem, struktur dan proses pendidikan" (Zamroni, 2000: 93).

Berkaitan dengan persoalan pertama, Boediono (1997: 113) mengemukakan pendidikan dilihat dari dimensi waktu dapat dibedakan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pendidikan dalam jangka pendek merupakan gejala pendidikan itu sendiri dimana peningkatan pengetahuan dan pembentukan watak anak didik merupakan tujuan utamanya. Pendidikan dalam jangka menengah merupakan gejala ekonomi yang mempersoalkan keterkaitan antara hasil pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga pemilikan pengetahuan dan keterampilan menjadi hal yang paling utama. Sedangkan pendidikan dalam jangka panjang merupakan gejala kebudayaan dimana penerusan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya merupakan tujuan pokoknya.

Pembedaan pendidikan ke dalam dimensi waktu tersebut tidak dapat dilihat secara fisik dalam proses pendidikan, karena ketiganya berlangsung secara simultan. Dengan kata lain pendidikan pada dasarnya merupakan gejala pedagogis, sosio-ekonomis dan kebudayaan sekaligus; suatu proses memanusiakan manusia yang memerlukan waktu panjang dan berkesinambungan.

Dalam konsepsi Ki Hadjar Dewantoro (Darmaningtyas, 1999: 176), pendidikan adalah proses memerdekakan manusia. Manusia merdeka adalah manusia kolektif, manusia yang selalu sadar bahwa dirinya adalah anggota masyarakat yang harus melakukan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh masyarakat kepadanya. Manusia merdeka yang kolektif ini adalah manusia yang sadar bahwa kebebasan dan kemerdekaannya berfikir dan berbuat untuk mencapai kebahagiaan hidup yang sudah menjadi haknya itu, haruslah dapat memperkaya masyarakatnya, memperkaya pergaulan hidup, memperkaya dengan hasil-hasil yang mempunyai nilai rohaniah. Manusia merdeka yang kolektif itu juga berarti manusia yang di dalam menggunakan haknya untuk mengatur dirinya sendiri selalu mengingat tertib damainya masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hakekat pendidikan (substansif-filosofis) seperti di atas, maka diperlukan dukungan kebijakan dari pejabat di lingkungan instansi pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai daerah; dan juga diperlukan kemampuan implementasi para personil sekolah sebagai institusi penyelenggaraan pendidikan.

Dalam segi kebijakan, banyak negara telah melangkah ke arah penyeimbangan struktur kewenangan pengelolaan pendidikan antara otoritas pusat, daerah dan institusi pendidikan seperti sekolah. Belajar dari kelemahan dan atau kegagalan pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik, negara-negara seperti: Inggris, Wales, Jerman, Kanada, Meksiko, Brasil, Argentina, Australia, Selandia Baru, Uganda, Simbabwe, Cina dan Hongkong-- berinisiatif memberikan kewenangan pengambilan kebijakan pengembangan pendidikan kepada intitusi yang langsung menyelenggarakan pendidikan, yaitu sekolah. Pemberian kewenangan pengambilan kebijakan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan yang berbasis sekolah ini, dinamakan berbeda-beda di setiap negara, seperti: swa-manajemen (*self-management*), manajemen lokal sekolah (*local management of schools*), sekolah pengelola bantuan (*grant-maintained schools*), sekolah masa depan (*the schools of the future*), sekolah unggulan (*better school*), manajemen berbasis sekolah (*school-based management*) dan masih banyak sebutan yang lain (Abu-Duhou, 2002: 3-4).

Konsep swa-manajemen sekolah di atas pada dasarnya mengacu kepada efisiensi dan efektivitas manajemen sumberdaya di tingkat sekolah yang ditransformasikan ke dalam pengalaman belajar peserta didik, di dalam kerangka kebijakan lokal dan nasional (negara). Sumberdaya tersebut mencakup pengetahuan, teknologi, kekuasaan, material, manusia, waktu dan keuangan. Dengan demikian keberhasilan pengelolaan sekolah ini sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah, sebagaimana dikatakan Abu-duhou (2002: 6) bahwa "peran kepemimpinan kepala sekolah di tingkat sekolah tampaknya cukup krusial untuk keberhasilan sistem swa-manajemen".

Zamroni (2000: 85) mengungkapkan bahwa kemerosotan kualitas pendidikan dikarenakan ketidak-mampuan organisasi sekolah menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan lingkungan; ketidak-mampuan tersebut mencerminkan ketidak-mampuan struktur dan sistem persekolahan. Dalam kaitan ini, Handy dan Aitken (1986: 32-33) menyarankan agar penyelenggaraan sekolah dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan "*The seven S's*", berikut ini:

- (1) *Decide on their key tasks, and the constituencies that they serve (the Strategy).*
- (2) *Devide up the work to be done (the Structure).*
- (3) *Find ways of monitoring what is going on (the System).*
- (4) *Recruit the right people and keep them excited and committed (the Staff)*
- (5) *Train and develop them in the competences required (the Skill).*

- (6) *Work out in the best way to lead and relate to the people (the Style).*
- (7) *Above all, create a sense of mission and a common set of beliefs (Shared values).*

Dengan demikian untuk dapat memberikan sumbangan yang bermakna di dalam peningkatan mutu pendidikan, organisasi sekolah harus dikelola secara profesional, baik dari segi internal maupun eksternalnya. Dalam segi internal perlu dilakukan penataan terhadap struktur, pembagian tugas, sistem pengendalian, pembinaan kemampuan staf, dan pengembangan kultur sekolah yang mendukung pencapaian hasil pendidikan yang berkualitas. Adapun dari segi eksternal diperlukan sistem yang memungkinkan sekolah dapat mengembangkan kemandirian dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*stakeholders*) terhadap sekolah tersebut. Untuk itu desentralisasi, debirokratisasi, restrukturisasi dan deregulasi sangat diperlukan untuk mereformasi penyelenggaraan pendidikan persekolahan, sehingga sekolah benar-benar menjadi arena pembelajaran bagi setiap peserta didik untuk mendapatkan kemampuan yang diperlukan guna mengarungi kehidupan di masa depan.

Komitmen dan Aksi yang Diperlukan Guna Mendidik Manusia Global

Di masa depan, bangsa kita hanya akan mampu memasuki "*the world system*" atau masyarakat dunia (global) dengan baik apabila anak-anak kita dibiasakan untuk melihat eksistensi bangsa dalam kaitan dengan eksistensi bangsa-bangsa lain, dan dengan persoalan-persoalan dunia yang dihadapi oleh seluruh umat manusia sebagai satu kesatuan (Buchori, 2001: 48-49). Dengan demikian pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan globalisasi, sehingga "Pendidikan tidak mungkin menisbikan proses globalisasi tersebut yang akan mewujudkan masyarakat global ini" (Zamroni, 2000: 90).

Dengan memperhatikan pemikiran tersebut maka kepada peserta didik perlu ditanamkan kesadaran bahwa sebagai bangsa kita tidak berdiri sendiri; bahwa keselamatan kita juga ditentukan oleh apa yang terjadi di tempat-tempat lain di dunia ini. Untuk itu, menurut Buchori (2001: 48-49), pendidikan harus dapat membangkitkan kesadaran nasional, kesadaran regional dan global. Selain itu juga kesadaran akan keharusan adanya pemerintahan dunia yang baik atau *humane geogovernance*, dan harus mampu memberikan kearifan berbangsa agar dalam memasuki proses modernisasi dunia itu tidak kehilangan kepribadian kita sebagai bangsa.

Dalam perspektif kurikuler, Zamroni (2000: 92) mengemukakan bahwa pendidikan berwawasan global seperti di atas akan menekankan pembahasan materi yang mencakup: (a) adanya saling ketergantungan di antara masyarakat dunia, (b) adanya perubahan yang akan terus berlangsung dari waktu ke waktu, (c) adanya perbedaan kultur di antara masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat oleh karena itu perlu adanya upaya untuk saling memahami budaya yang lain, (d) adanya kenyataan bahwa kehidupan dunia memiliki berbagai keterbatasan antara lain dalam wujud ketersediaan barang-barang kebutuhan yang jarang, dan (e) untuk dapat memenuhi kebutuhan yang jarang tersebut tidak mustahil menimbulkan konflik-konflik.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa kurikulum hanyalah sekedar alat untuk mencapai tujuan akhir pendidikan, yakni terbentuknya kemampuan untuk mengarungi kehidupan di masa mendatang. Sebagai alat maka efektivitas, efisiensi dan produktivitasnya sangat tergantung pada guru dan fasilitas pendukung yang dimiliki sekolah. Sekolah sendiri sebagai institusi pendidikan yang diatur oleh birokrasi sistem pendidikan secara keseluruhan. Untuk itu pengaturan-pengaturan dari birokrasi pendidikan harus selalu dilandasi oleh pemikiran dan upaya nyata untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang seringkali muncul adalah birokrasi pendidikan seringkali terlalu jauh mencampuri urusan pedagogis, yang justru menghambat kreativitas sekolah dan guru. Permasalahan ini terjadi karena kewenangan birokrasi pendidikan mencakup pengaturan penyelenggaraan sekolah dan pembinaan guru. Untuk itu para pejabat birokrasi pendidikan harus menyadari perbedaan antara kewenangan administratif dengan kewenangan pedagogis yang seharusnya menjadi otoritas sekolah dan guru. Kewenangan administratif itupun harus diberdayagunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pedagogis, bukan sebaliknya malah menghambat. Dengan demikian birokrasi pendidikan harus dapat memberikan kepercayaan kepada sekolah dan guru untuk menggunakan kewenangan pedagogis dalam mengendalikan proses pendidikan di sekolah atau kelas.

Di sisi lain agar kepercayaan dan kewenangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan diperlukan komitmen dan kemampuan guru. Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, seorang guru harus selalu mengacu kepada tujuan utuh pendidikan, tidak berhenti semata-mata pada tujuan instruksional saja. Guru yang profesional harus mampu merancang kegiatan pembelajaran yang

memungkinkan para peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara alami dan kreatif dalam suasana penuh kebebasan, kebersamaan dan tanggungjawab. Dengan demikian pendidikan sebagai proses penyiapan suatu generasi untuk menghadapi masa depan, dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Penutup

Pendidikan dapat dipandang sebagai berbagai cara atau upaya untuk mengembangkan penalaran, sikap dan perilaku seseorang agar dapat memiliki kemampuan untuk mengarungi hidup secara bermakna di dalam lingkungan masyarakat dan jamannya. Dengan kondisi keluarga dan masyarakat yang harus melaksanakan berbagai fungsi kehidupan, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi; maka sekolah masih tetap menjadi institusi pendidikan yang utama.

Sementara itu proses globalisasi telah merambah kehidupan masyarakat di belahan bumi manapun. Untuk itu pendidikan persekolahan tidak dapat mengabaikan era globalisasi yang bercirikan keunggulan untuk berkompetisi dan sekaligus keharusan untuk saling kerjasama di antara warga dunia. Implikasi perkembangan jaman tersebut, menuntut institusi sekolah untuk menyediakan layanan kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal sehingga setelah lulus yang bersangkutan dapat mengarungi kehidupan secara layak di jaman globalisasi ini.

Tugas strategis penyiapan sumberdaya manusia global tersebut hanya mungkin dapat dilaksanakan apabila didukung oleh kebijakan yang memungkinkan sekolah dan guru dapat menggunakan kewenangan pedagogisnya secara profesional. Untuk itu para pejabat birokrasi pendidikan harus dapat mendayagunakan kewenangan administratif yang dimiliki untuk mendukung secara penuh pelaksanaan kewenangan pedagogis tersebut. Selanjutnya agar pelaksanaan kewenangan pedagogis di atas dapat dipertanggung-gugatkan (*akuntabel*) kepada *stakeholders*; guru harus memiliki komitmen dan kemampuan untuk menterjemahkan kurikulum berwawasan global ke dalam teknis pembelajaran yang kreatif, demokratis, dan dalam suasana penuh kebebasan dan kebersamaan yang bertanggungjawab. Dengan demikian sekolah dapat berperan secara bermakna dalam mempersiapkan peserta didik untuk memasuki kehidupan global.

Daftar Pustaka

- Anonim. (1998). "Lewat Presentase Anggaran, Belajar dari Negara Lain". *Kompas*, 2 Mei 1998.
- (2000). "Dalam Pengembangan SDM Jangan Kita Ulangi Kesalahan Orde Baru". *Tajuk Rencana Kompas*, 26 Februari . 2000
- Charles Handy and Robert Aitken. (1986). *Understanding Schools as Organizations*. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Books Ltd.
- Darmaningtyas. (1999). *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. Yogyakarta: LPIST-Pustaka Pelajar.
- D. Bob Gowin. (1990). *Educating*. New York: Cornell University Press.
- Eko Budihardjo. (2002). "Membumikan Iptek" dalam *Kompas*, 14 Februari 2002.
- A. Rukmini. (2003). "Go to Hell with Curriculum", *Kompas* 14 Februari 2003.
- Ibtisam Abu-duhou. (2002). *School-Based Management*. Jakarta: Logos.
- Jerome S. Arcaro. (1995). *Quality in Education: An Implementation Handbook*. Florida: St. Lucie Press.
- Mochtar Buchori. (2001). *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). *Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tim Broad Based Education Depdiknas. (2002). *Konsep Pendidikan Beorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill Education)*. Jakarta: Depdiknas.
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: BIGRAF Publishing.